



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

INDONESIA MEMASUKI PEMILU PUTARAN II

Ekonomi Politik: Kebijakan Penyediaan Pangan Beras
Supriyadi Wiryatmodjo

Wayang Topeng Glagahdowo
Kajian Etnografi Perubahan dan Fungsi Wayang Topeng
pada Masyarakat Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang,
Kabupaten Malang
Djoko Adi Prasetyo

Akomodasi Parpol Terhadap Kuota Perempuan
dalam Pemilu 2004
Dwi Windyastuti

Peran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi
Nasikun

Citra Perempuan Islam Kontemporer:
Representasi Perempuan Islam dalam Sinetron Ramadhan
Yuyun W.I Surya

Problema Budaya dalam P2KP/Proyek Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Retno Andriati

Resensi Buku:
Presiden Golput
Herwanto, AM

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Dalam edisi kali ini redaksi sengaja melanjutkan edisi sebelumnya –Indonesia memasuki Pemilu Putaran I– dengan mengambil tema Indonesia memasuki Pemilu Putaran II. Seperti kita ketahui bersama dalam tahap terakhir “partai final” perebutan tampuk kekuasaan RI 1 akan muncul dan terpilih sang pemimpin yang mewakili kehendak suara rakyat –karena dipilih secara langsung. Seperti apakah bentuk pemerintahan dan siapa saja tokoh-tokoh yang dipilih untuk mendampingi sang presiden, tentunya akan dapat kita rasakan manfaatnya dengan capaian program-program pembangunan sang Presiden yang dilontarkan saat kampanye terdahulu. Bahkan beberapa pengamat dengan berani mencoba mengkritisi jalannya pemerintahan dalam evaluasi 100 hari untuk mencermati serta dengan tegas mendealade kinerja pemerintah.

Dengan adanya perubahan peta politik yang secara cepat, serta eskalasi suhu politik yang mulai memanasi. Beberapa tulisan yang diterima redaksi mencoba untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, apa yang terjadi ke depan dicoba untuk ditelaah dengan berkaca pada keberhasilan dan kegagalan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu. Secara pandangan ekonomi Supriyadi Wiryatmodjo mengupas masalah Ekonomi Politik Kebijakan Penyediaan Pangan Beras, dari segi gender Dwi Windyastuti mencoba mengemukakan gagasan Akomodasi Parpol terhadap Kuota Perempuan dalam Pemilu 2004, penerapan dari segi budaya diulas dengan gamblang dalam Problema Budaya dalam P2KP/Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan oleh Retno Andriati, serta resensi dari Herwanto mengenai Presiden Golput yang ditulis oleh Muhamad Asfar. Di luar tema, redaksi memuat Wayang Topeng Glagahdowo (Kajian Etnografi Perubahan dan Fungsi Wayang Topeng pada Masyarakat Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang) oleh Djoko Adi Prasetyo, Peran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi oleh Nasikun serta Citra Perempuan Islam Kontemporer: Representasi Perempuan Islam dalam Sinetron Ramadhan oleh Yuyun W.I Surya.

Semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat membawa angin segar perubahan serta menambah wawasan dan sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2005:
Bencana, Solidaritas dan Integrasi Nasional

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Ekonomi Politik: Kebijakan Penyediaan Pangan Beras

Supriyadi Wiryatmodjo

1

Wayang Topeng Glagahdowo

Kajian Etnografi Perubahan dan Fungsi Wayang Topeng pada Masyarakat Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang,

Kabupaten Malang

Djoko Adi Prasetyo

17

Akomodasi Parpol Terhadap Kuota Perempuan dalam Pemilu 2004

Dwi Windyastuti

37

Peran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi

Nasikun

51

Citra Perempuan Islam Kontemporer: Representasi Perempuan Islam dalam Sinetron Ramadhan

Yuyun W.I Surya

67

Problema Budaya dalam P2KP/Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Retno Andriati

83

Resensi Buku: Presiden Golput

Herwanto, AM

AKOMODASI PARPOL TERHADAP KUOTA PEREMPUAN DALAM PEMILU 2004

Dwi Windyastuti
Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unair

Abstract

Woman participation in politics is the key component of democracy. Based on the quota for woman, government should have facilitated woman's organizations to play the role in enhancing woman's representativeness. This commitment on equal opportunity is strongly applied to political organizations. It is also important to consider other ways in effectively applying woman's representativeness. Misleading between social and biological roles of woman has to be reduced in order to eradicate sex disparity in political arena. Woman does not offer alternative between public and private domain as offered to man. Woman who joins the election need to consider the participation in political party as legislative candidate.

Keywords: *woman participation, quota for woman, woman representativeness, role disparity*

Debat tentang pembaharuan sistem pemilu melahirkan dampak yang bersifat praktis yaitu perubahan statusquo, dalam arti bahwa sistem pemilu yang selama ini bermodelkan pria mengalami transformasi ke sistem pemilu yang *gender sensitive*. Di bawah argumentasi tentang prinsip demokrasi, kriteria normatif dalam sistem pemilu

berupaya mempertemukan representasi sosial, seperti perempuan sebagai minoritas dalam jabatan publik dan politis. Selama ini perancangan sistem pemilu kebanyakan didominasi oleh kaum pria, yang menghasilkan *underrepresented* perempuan dalam jabatan-jabatan baik yang diangkat maupun yang dipilih. Untuk jelasnya lihat tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Beberapa Negara

Negara	Tahun	Anggota Legislatif		Jumlah Kursi
		% Perempuan	% Pria	
Netherland	1998	36.0	64.0	150
Polandia	1997	13.0	87.0	460
Czech	1998	15.0	85.0	200
Slovakia	1998	12.7	87.3	150
Lithuania	1996	17.5	82.5	137
Russia	1995	10.2	89.8	450
Finlandia	1999	37.0	63.0	200
Ukraina	1998	7.8	92.2	450
Hungaria	1998	8.3	91.7	386
Romania	1996	7.3	92.7	343
Bulgaria	1997	10.8	89.2	240
Swedia	1998	42.7	57.3	349
Austria	1995	26.8	73.2	183
Denmark	1998	37.4	62.6	179
Norwegia	1997	36.4	63.6	165
Jerman	1998	30.9	59.1	669
Selandia Baru	1996	29.2	70.8	120
Belgium	1995	23.9	76.1	70
Cuba	1998	27.6	72.4	601
Argentina	1997	27.6	72.4	120
Italia	1996	11.1	88.9	630
Afrika Selatan	1994	29.8	70.2	400
Mozambik	1994	25.2	74.8	250
Vietnam	1997	26.0	74.0	450
Iceland	1995	25.4	74.6	63
Australia	1998	22.4	77.6	147
Monacco	1998	22.2	77.8	184
Namibia	1994	22.2	77.8	72
China	1998	21.8	78.2	2979
Spanyol	1996	21.6	78.4	348
Switzerland	1995	21.0	79.0	200
Canada	1997	20.6	79.4	301
Korea	1998	20.1	79.9	687
Luxemburg	1994	12.2	87.8	60
Costa Rica	1998	19.3	80.7	57
United Kingdom	1999	8.8	91.2	1165
Turkmenistan	1994	9.18	90.82	50
Uganda	1996	17.9	82.1	279
Equador	1998	17.4	82.6	121
Mexico	1997	17.4	82.6	500
Rwanda	1994	17.1	82.9	70
Latvia	1998	17.0	83.0	100
Amerika	1998	13.3	86.7	435
Filipina	1998	12.4	87.6	217
India	1998	8.1	91.9	545
Thailand	1996	5.6	94.4	393
Jepang	1996	4.6	95.4	500
Mesir	1995	2.0	98.0	454
Djibouti	1997	0.0	100.0	65
Kuwait	1996	0.0	100.0	50
Jordania	1997	0.0	100.0	80
Maroko	1997	0.6	99.4	70
Pakistan	1997	2.3	97.7	217
Singapore	1997	4.3	95.7	934

Sumber : *Women in World Parliaments*. Geneva: Inter-Parliamentary Union. May 1999.

Sedangkan Indonesia sebagai negara yang sedang menapak menuju demokrasi tidak terlepas dari kecenderungan global yakni *underrepresented* perempuan di lembaga legislatif. Untuk jelasnya bisa dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Proporsi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif di Indonesia

Pemilu	Total Anggota	Pria	% Pria	Perempuan	% Perempuan
1955	272	255	93,7	17	6,3
1971	460	437	94,9	23	5,1
1977	460	427	92,8	33	7,2
1982	460	421	91,5	39	8,5
1987	500	450	90,0	50	10,0
1992	500	446	89,2	54	10,8
1997	500	442	88,4	58	11,6
1999	500	455	91,0	45	9,0
2004	550	485	88,19	65	11,81

Sumber : *Libang Kompas*, 24 Februari 2003 dan KPU, 2004

Pada setiap fase pemilu perempuan mengalami peningkatan representasi yang sangat lambat. Pada pemilu 2004 dengan rejim kuota, perempuan Indonesia hanya mengalami peningkatan 0.01% dibandingkan dengan Pemilu 1992 yang tidak menggunakan kuota, sedangkan bila dibandingkan dengan Pemilu 1999 mengalami peningkatan sebesar 2.81%. Lihat tabel di bawah ini.

Tabel 3. Perbandingan Proporsi Anggota DPR – RI 1999-2004 dengan 2004-2009 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Partai

No	Nama Partai Politik	2004-2009			1999-2004		
		Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Partai Golkar	19 (14,28%)	114 (85,71%)	133	16 (13,3%)	104 (86,7%)	120
2	PDI-P	12 (11,11%)	96 (88,88%)	108	15 (9,8%)	138 (90,2%)	153
3	PPP	3 (5,26%)	54 (94,74%)	57	3 (5,2%)	55 (94,8%)	58
4	Partai Demokrat	8 (14,04%)	49 (85,71%)	57	-	-	-
5	Partai kebangkitan Bangsa	7 (13,20%)	46 (86,79%)	53	3 (5,9%)	48 (94,45%)	51
6	Partai Amanat Nasional	7 (13,20%)	42 (85,71%)	49	2 (4,9%)	39 (94,1%)	41
7	Partai Keadilan Sejahtera	5 (10,41%)	43 (89,58%)	48	-	-	-
8	Partai Bintang Reformasi	2 (15,38%)	11 (84,61%)	13	-	-	-
9	Partai Bulan Bintang	0	11 (100%)	11	1 (7,7%)	12 (92,3%)	13
10	Partai Damai Sejahtera	2 (25%)	8 (75%)	10	-	-	-
11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	3 (100%)	3	-	-	-
12	Partai Merdeka	0	2 (100%)	2	-	-	-
13	Partai Karya Peduli Bangsa	0	2 (100%)	2	-	-	-
14	P. Persatuan Demokrasi Kebangsaan	0	2 (100%)	2	-	-	-
15	Partai Perhimpunan Indonesia baru	0	1 (100%)	1	-	-	-
16	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	1 (100%)	1	-	-	-
	Total	65 (11,81%)	485 (88,19%)	550	40 (9,2%)	396 (90,8%)	436*

* Jumlah total wakil DPR – RI tahun 1999 – 2004 = 500 (sisanya perwakilan dari TNI dan partai-partai lain yang tidak lolos electoralthreshold)

**Sumber data : KPU, 2004, dan diolah

Pada pemilu 2004 ternyata terdapat 65 (11.81%) anggota legislatif perempuan berdasarkan hasil pemilu tahun 2004, dan 485 (88.19%) adalah anggota legislatif pria. Jumlah ini masih sangat rendah bila dibandingkan dengan hasil kuota di beberapa negara. *Affirmative Action* yang diwujudkan dalam bentuk jurus kuota di parlemen di beberapa Negara memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan jumlah kursi yang mampu dipegang oleh kaum perempuan di berbagai negara. Untuk jelasnya lihat tabel 4.

Kendati Indonesia telah menerapkan jurus kuota pada pemilu 2004 sebesar 30% tetapi ternyata hanya mampu mengontrol perempuan di DPR sebesar 11.81%. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan kuota perempuan sangat bergantung kepada partai politik. Setidaknya hal ini ditunjukkan dengan berbagai fungsi yang dijalankan oleh parpol, seperti artikulasi kepentingan, pendidikan politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, sosialisasi politik. Oleh sebab itu parpol menjadi lembaga politik

Tabel 4. Negara Yang Menerapkan *Affirmative Action*

Negara	% Perempuan Untuk Caleg	% Perempuan di Legislatif
Austria	50.0	26.8
Belgia	25.0	23.3
Denmark	40.0	33.3
Perancis	30.0	10.9
Jerman	50.0	30.9
Irlandia	40.0	10.9
Swedia	50.0	42.7
Inggris Raya	40.0	9.5
Belanda	30.00	26.7
Argentina	30.0	27.6
Brazil	30.0	16.0
Chili	20.0-40.0	11.0
Costa Rica	40.0	19.3
El Salvador	35.0	6.0
Mexico	30.0	17.4
Nicaragua	30.0	10.0
Paraguay	20.0	18.0
Venezuela	20.0	8.0
Norwegia	40.0	36.4
Indonesia	30.0	11.81

Sumber: www.europarl.eu.int/workingpaper/femm/w10/default.de.htm dan www.iadb.org/sds/doc/malaEnglish.pdf

yang jauh dinamis dibandingkan dengan lembaga formal lainnya. Namun dalam praksis politik parpol dan lembaga legislatif lebih dipahami sebagai *struggle for power* daripada sebagai artikulator kepentingan. Akibatnya kepentingan perempuan tidak pernah terakomodasi karena sedikitnya perempuan yang duduk dalam kelembagaan politik.

Kuota perempuan dalam nominasi caleg telah memberikan paradigma baru tentang politik dan kekuasaan. Feminisasi politik diharapkan akan memberikan definisi baru pada kekuasaan dari perspektif yang selama ini tak pernah mendapat tempat. Selama ini nosi dunia politik formal yang didominasi pria masih *zero sum game*, kalah atau menang. Pembagian kekuasaan antara pria dan perempuan akan mengurangi representasi pria. Namun ditengarai budaya dalam tubuh parpol belum kondusif untuk representasi politik perempuan bahkan perempuan masuk ke dalam politik kekuasaan. Akibatnya perempuan enggan masuk ke parpol yang untuk Indonesia ini merupakan jalan satu-satunya bagi perempuan menuju ke kursi parlemen.

Perumusan Masalah

Yang menjadi sentral permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola rekrutmen calon legislative di Partai politik Pada pemilu 2004?
2. Bagaimana partai politik mengakomodasi kuota perempuan di dalam penetapan calon anggota legislatif di dalam Pemilu 2004?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan oleh parpol di dalam mengakomodasi kuota perempuan

dalam penetapan calon legislatif pada Pemilu 2004?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tentang aturan dan tata cara seleksi calon legislatif di partai politik pada pemilu 2004.
2. Mengetahui sejauhmana partai politik telah mengakomodasi kuota perempuan dalam penetapan calon legislatif pada pemilu 2004 .
3. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui parpol dalam mengakomodasi kuota perempuan dalam penetapan calon legislatif pada pemilu 2004.

Sedangkan penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Menambah *body of knowledge* dalam ilmu politik, terutama sebagai *data base* tentang implementasi kuota perempuan pada penetapan calon legislatif pada pemilu 2004.
2. Setting penelitian ini relatif baru di Indonesia, karena kuota perempuan baru diberlakukan pada pemilu tahun 2004.
3. Sebagai evaluasi dalam penerapan kuota perempuan dalam mewujudkan representasi politik perempuan.

Tinjauan Pustaka

1. Gender

Di dalam konteks konsep gender ketidaksamaan dilihat sebagai konstruksi sosial budaya yang mempengaruhi baik pria maupun perempuan dalam kehidupan dimana kedua jenis kelamin tersebut seharusnya sama-sama memiliki tanggungjawab. Berbeda dengan komponen istilah jenis kelamin yang mengacu pada biologis, gender sebagai

istilah yang membelah peran-peran spesifik gender yang diatributkan pada pria dan perempuan di dalam masyarakat. Peran-peran ini tidak ditentukan oleh kriteria biologi tetapi oleh kondisi struktural, peran budaya, norma. Peran gender dan hirarki gender bervariasi dari satu budaya ke budaya lain dan dapat berubah. Dalam anggapan kaum sosiobiolog kaum pria primitif mendominasi perempuan, bahkan budaya tinggi melembagakan dominasi ini, sehingga genetika merupakan biang dari keteraturan penerapan pola pengunggulan pria dan submisifnya perempuan. Dominasi genetik pria menjadi patokan peran-peran seksual dari dulu hingga sekarang. (Ivan Illich, 2002:50).

Ketika dari yang biologis ini menjadikan perbedaan sifat maskulin dan feminim orang akan memperdebatkan. Menurut Ratna Megawangi (1999: 94-95) terdapat dua argumen yang berkembang yang saling bertentangan mengenai pembentukan sifat maskulin dan feminim pada pria dan perempuan, yaitu: (1) Argumen yang percaya bahwa perbedaan dari sifat maskulin dan feminim, banyak yang tidak sepakat. Pada dasarnya, ada dua argumen yang saling bertentangan mengenai pembentukan sifat maskulin dan feminim ada hubungannya dengan, bahkan tidak lepas dari, pengaruh perbedaan biologis (seks) pria dan perempuan. Perbedaan biologis pria dan perempuan adalah alami, begitu pula sifat maskulin dan feminim yang dibentuknya. Oleh karena itu, sifat stereotip gender sulit untuk diubah. Argumen ini sering disebut mazhab esensial biologis (*biological essentialism*), atau orientasi biologis (*biologically oriented contestants*). Para penganut ini antara lain Rossi, Carol Gilligan. Argumen ini melahirkan

pemikiran bahwa perbedaan alami antara pria dan perempuan (*nature*) akan melahirkan perbedaan peran-peran jenis kelamin. Rossi dan Carol Gilligan mampu membelokkan diskursus feminisme ke arah *biological essentialism*. Gilligan telah memberikan kontribusinya pada krisis identitas feminis di tahun 1990-an yaitu era diterimanya kembali konsep perbedaan gender antara pria dan perempuan. Krisis identitas feminisme terjadi karena penolakannya terhadap argumen *nature* tentang adanya peran stereotipi gender, sedangkan pada kenyataannya *nature* perempuan tidak pernah lepas dari peran feminim. Mereka percaya bahwa dengan adanya perbedaan gender tidak pernah berusaha mengubah lingkungan budaya untuk membebaskan perempuan dan pria dari stereotipi gender. Maraknya pemikiran ekofeminisme di Barat sepuluh tahun terakhir yaitu aliran yang ingin menonjolkan keagungan sifat perempuan sebagai pelindung dan pengasuh merupakan salah satu indikator bahwa argumen *biological essentialism* lebih dominan dalam diskursus feminisme.

Argumen kedua yang percaya bahwa pembentukan sifat maskulin dan feminisme bukan disebabkan oleh adanya perbedaan biologis antara pria dan perempuan, melainkan karena adanya sosialisasi atau kulturisasi. Mereka tidak mengakui adanya sifat alami maskulin dan sifat alami feminim (*nature*), tetapi yang ada adalah sifat maskulin dan feminim yang dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi (*nurture*). Argumen ini membedakan antara jenis kelamin (*sex*) yang merupakan konsep *nature*, dan gender yang merupakan konsep *nature*. Pemikiran ini disebut mazhab orientasi kultur (*culturally ori-*

ented cotestants), dan dianut oleh sebagian besar feminisme yang menginginkan transformasi sosial, sehingga perbedaan gender pria dan perempuan bisa dilenyapkan. Argumen ke dua ini sangat percaya perubahan-perubahan struktural-kultural akan membebaskan perempuan dari hambatan biologis, sehingga kesetaraan akan terwujud.

Menurut Mansour Fakih (2003:12-23) akibat yang ditimbulkan oleh perbedaan gender adalah ketidakadilan. Ketidakadilan gender dapat mewujudkan ke dalam beberapa bentuk diantaranya: 1) Marginalisasi perempuan, 2) Subordinasi, 3) Stereotipi, 4) Kekerasan yang disebabkan oleh anggapan gender atau sering disebut dengan *gender-related violence*, 5) Beban Kerja.

Disparitas antara pria dan perempuan dalam relasi gender menjadi perhatian utama dari kaum yang memperjuangkan kesetaraan perempuan (feminis). Kemunculan gerakan pembela perempuan telah menandai sebuah orde dalam rangka membangkitkan kesadaran perempuan akan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lain. Oleh sebab itu Ratna Megawangi (1999: 111-192) beberapa gerakan feminis berupaya menghapuskan *nature* feminisme melalui transformasi sosial antara lain :

1) Feminis Egalitis, yang berpandangan bahwa subordinasi perempuan disebabkan oleh institusi yang *androcentris* yaitu sistem sosial yang didominasi oleh pria. Sistem androcentris adalah sistem hirarkhis (*patrarkhat*) dimana ada strata atas yang memegang kekuasaan dan strata bawah yang menjadi subordinasinya. Sistem yang *androcentris* tidak bisa menciptakan kesetaraan gender sehingga sistem ini perlu dirombak dari

yang hirarkhis-paternalistik menjadi sistem horizontal egalitarian.. Usaha untuk merombak sistem ini dengan merombak struktur sosial yang ada. Perempuan perlu masuk ke dalam dunia pria agar kedudukan dan statusnya setara dengan pria. Diantara kelompok yang masuk ke dalam aliran ini antara lain feminis me Liberal, Feminisme Sosialisme, dan Teologi pembebasan.

2) Feminis Kultural yang berargumen bahwa ketidaksetaraan gender bisa dilakukan dengan mentransformasi sosial melalui pelestarian *nature* atau sering disebut dengan feminisme kultural. Kelompok ini percaya dengan determinisme biologi yang menegaskan adanya perbedaan alami perempuan dengan pria, sehingga timbul kualitas feminis dan kualitas maskulin. Kelompok ini berpandangan bahwa untuk meruntuhkan sistem patriarkhat hanya dapat dilakukan dengan menonjolkan kualitas femininnya. Kelompok ini terbelah menjadi dua yakni Ekofeminisme dan Feminis Radikal.

2. Kuota

Di beberapa negara menjalankan kuota yang diberlakukan pada kelompok kelompok minoritas seperti etnis, daerah, bahasa atau kelompok kelompok agama. Demikian halnya sistem pemilu memasukkan jenis kuota, misal kuota yang didasarkan kepada wilayah yang berpenduduk padat diberi kursi di parlemen. Menurut Anne Phillips dalam tulisannya Ms Drude Dahlerup dengan artikelnya "No Democration Without Woman" (2003) ada 3 argumentasi pentingnya sistem kuota untuk representasi perempuan: 1) Argumen keadilan yang menyatakan bahwa perempuan mewakili separuh penduduk dan tentunya punya hak setengah kursi; 2) Argumen pengalaman,

dimana perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (konstruksi secara biologis dan sosial) sehingga mestinya perempuan terwakili; 3) Argumen kelompok kepentingan yaitu bahwa perempuan dan laki laki mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga laki-laki tidak dapat mewakili kepentingan perempuan (argumen kelompok kepentingan); 4) Argumen yang terkait dengan pentingnya politisi perempuan sebagai model-model peran yang mencirikan jalan bagi perempuan lain.

Kuota dianggap sebagai strategi untuk menata hirarki politik yang disebut dengan politik afirmasi. Keadilan mensyaratkan pengakuan terhadap perbedaan dan kerelaan redistribusi sumber-sumber sosio-ekonomi. Dengan demikian representasi menjadi strategi pengakuan daripada redistribusi. Fraser (1995) membedakan dua pendekatan untuk mengurangi ketidakadilan : 1) Pendekatan *Remedial-Affirmative*, yang memusatkan perhatian pada pengkoreksian hasil tatanan sosial yang tidak seimbang tanpa mengganggu penetapan kerangka kerja yang melahirkannya; 2) Pendekatan *Remedial-Transformative* yang memusatkan perhatian pada pengkoreksian hasil yang tidak seimbang dengan merombak garis besar kerangka generatif. Pendekatan *remedial affirmative* memperkuat perbedaan kelompok dan *remedial transformative* dalam jangka panjang cenderung mendestabilisasi. Fraser melihat kombinasi sosialisme dengan dekonstruksi sebagai remedial yang paling cocok dalam menyelesaikan problema dilematis antara pengakuan dan redistribusi.

Perdebatan antara pengakuan

dengan redistribusi dalam persoalan kuota dan demokrasi bersumber pada dua argumen teoritik yaitu : 1) argumen yang menganggap bahwa kebijakan kuota berlawanan dengan prinsip kesempatan yang sama dan karena itu tidak demokratis karena berlawanan dengan prinsip meritokrasi; 2) argumen yang memandang dari aspek hakekat perwakilan kepentingan—kepentingan siapa yang diwakili, dapatkah perempuan dianggap sebagai kelompok homogen.

Akan tetapi meskipun kadang ditanggapi dengan pesimis, setidaknya ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menerapkan sistem kuota, antara lain: 1) Pengurangan ketidaksetaraan, diskriminasi, menghilangkan dorongan *underclass*, memberi akses yang sama pada masyarakat; 2) Cara efektif yang ditujukan untuk menghilangkan ketidakseimbangan pada masa lalu; 3) menyajikan peluang yang sama bagi masyarakat.

3. Partai Politik

Partai politik sebagai entitas politik, ia juga sebuah subsistem dari sistem politik. Dari sinilah beragama pengertian partai politik didefinisikan. Miriam Budiardjo, (1999: 160-161) menyatakan bahwa partai atau kelompok adalah kelompok warga negara yang terorganisir, dimana anggota anggotanya memiliki nilai nilai, orientasi dan cita caita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional, dalam melaksanakan kebijakan kebijakan mereka. Dengan demikian sebagai sebuah subsistem kualitas parpol bukan ditentukan oleh bagian-bagian yang ada di dalamnya, seperti figur pimpinan, namun ditentukan

oleh ideologi, besaran organisasi, platform parpol.

Richard Gunter dan Larry Diamond, 2000: 9-34) di dalam studinya tentang parpol memperkenalkan beberapa tipologi partai. Setidaknya ada 3 kriteria dalam melihat tipologi partai yaitu : (1) besarnya organisasi formal partai dan tingkat fungsi yang dijalankan partai; (2) apakah partai toleran dan pluralistic atau proto hegemonik dalam tujuan dan perilaku partai; (3) apakah partai memiliki komitmen ideologis atau praksis. Dari ketiga kriteria tersebut terdapat beberapa tipologi partai: 1) *partai elit*, partai yang mempunyai struktur organisasi utama sangat minimal dan sangat bergantung pada terbentuknya elit elit di dalam wilayah geografi tertentu, serta sangat menghargai tradisi lokal; 2) *partai yang berbasiskan massa*, dicirikan dengan basis yang luas pada anggota pekerja, berupaya memantapkan ideologi partai dan membangun basis keanggotaan yang aktif, berupaya masuk ke dalam sejumlah ruang kehidupan sosial misalnya serikat dagang kesatuan agama; 3) partai yang berbasiskan etnis, berupaya memobilisasi pemilih dalam kelompok-kelompok etnis, memiliki derajat ideologi yang sangat rendah, komitmennya sangat pragmatis yaitu menjamin proteksi dan keuntungan materiil, kultural dan politik untuk kelompok etnis di dalam kompetisi dengan kelompok lain; 4) partai elektoralist, partai yang sangat profesional melakukan kampanye, berupaya mengagregasikan berbagai kepentingan sosial, berorientasi pada kebijakan, kurang menyatakan secara tegas ideologi, cenderung menekankan pada atribut personal yang sangat menarik dari kandidat-kandidatnya dan nominasi lebih ditentukan oleh sumber suara

dari kandidat daripada kriteria organisasi seperti lamanya pengalaman dedikasi pada partai; 5) Partai gerakan, ini merupakan tipologi antara partai dan gerakan.

Larry Diamond dan Richard Gunther (2002: 5-9) menyatakan parpol memiliki banyak fungsi antara lain : 1) Rekrutmen elit, dimana dua fase dalam proses pemilu yaitu nominasi kandidat dan mobilisasi pemilih; 2) Menstrukturkan isu yang berkembang dalam masyarakat; 3) Mewakili berbagai kelompok sosial; 4) Agregasi kepentingan; 5) membentuk dan mempertahankan pemerintahan; 6) memainkan peran integrasi sosial.

Dalam sistem perekrutan ini terdapat dua cara khusus: seleksi pemilihan melalui ujian serta latihan. Selain itu terdapat beberapa metode yang dipergunakan dalam sistem ini yakni: 1) rotasi dan pengundian; 2) perebutan kekuasaan dalam suatu rezim politik bisa dengan *caup d'etat*, revolusi, intervensi militer dari luar, kerusuhan rakyat-efektif untuk perubahan radikal personil di tingkat-tingkat lebih tinggi dalam partisipasi politiknya. Selain itu menurut Michael Rush dan Phillip Althof (1985:189-191) ada cara perekrutan yang lain yang diasosiasikan perubahan personil yang efektif, yaitu: 1) patronage, 2) kooptasi (pemilihan anggota baru). Menurut Andrew Jackson (Rush dan Althof, 1985:222-223) terdapat 3 sistem dalam merekrut seseorang untuk berada dalam jabatan administratif yaitu: 1) Sistem kegunaan / *Merit System* (keahlian); 2) Sistem *Patronage*, 3) Sistem pilih kasih / *Spoils System*.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Partai Politik yang ada di Kota Surabaya baik di DPD

Jawa timur maupun DPD Kota Surabaya. Sebanyak 6 parpol menjadi subyek penelitian yakni PAN, PKB, PNBK, PPP, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat. Sedangkan informasi digali dari wawancara dengan beberapa caleg perempuan, pengurus partai politik, dokumen dari KPU/KPUD, internet, Koran, jurnal. Dari hasil temuan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan Hasil

Partipasi perempuan dalam politik merupakan komponen kunci dari demokrasi. Oleh sebab itu isu partisipasi politik perempuan menghiasi seluruh pandangan demokrasi di seluruh dunia, baik negara yang memang telah memberikan ruang maupun belum untuk partisipasi politik perempuan. Memang kondisi untuk menuju demokrasi tidak semuanya *comfortabel*, namun kelompok-kelompok perempuanlah yang mengawali bahwa mereka dapat menjadi kekuatan untuk perubahan ke demokrasi.

Secara teoritik hak untuk ikut pemilu, menjadi kandidat pada pemilu lebih didasarkan pada hak dalam pemilu. Akan tetapi realitasnya bahwa hak untuk dipilih bagi perempuan tetap terbatas yang pada akhirnya berdampak pada tingkat representasi perempuan di lembaga-lembaga parlemen yang sangat rendah. Ketidaksamaan representasi tersebut menandakan bahwa representasi perempuan lebih sekedar sebagai fungsi mempertahankan statusquo (pria) daripada fungsi demokratisasi.

Dari fakta empiris, bahwa proses seleksi, baik dalam pola, tata cara maupun kriteria, parpol secara formal senantiasa mengedepankan prasyarat-prasyarat

sebagaimana yang dibuat KPU maupun yang diterapkan secara tertulis dari parpol. Pola rekrutmen calon legislatif di sejumlah partai memadukan antara *experience sistem* dengan *patronage sistem*. Senioritas dan loyalitas juga mempengaruhi penetapan calon anggota legislatif. Namun kenyataannya kriteria non formal dari temuan ternyata lebih mengedepan dalam pola rekrutmen di sejumlah parpol, seperti kekerabatan.

Selanjutnya kecenderungan di parpol dengan model politik yang maskulin. Kehidupan politik diorganisasi menurut norma dan nilai pria, misal: gagasan tentang menang dan kalah, kompetisi dan konfrontasi, kualitas dan kuantitas lebih dikedepankan daripada saling menghargai, membangun kerjasama dan konsensus. Kondisi semacam ini semakin mengasingkan perempuan, dan model yang didominasi pria semakin besar dalam kehidupan politik, akibatnya ketika perempuan berpartisipasi dalam politik cenderung menjadi rendah dalam jumlahnya. Meskipun KPU telah mensyaratkan secara administratif atas ketentuan dalam pencalegan, dan himbauan moral agar menyikapi terhadap pasal 65 tentang kuota perempuan, namun kebanyakan partai masih memiliki kriteria internal partai yang diberlakukan kepada semua caleg. Di sejumlah parpol memperlakukan kriteria yang sama antara pria dan wanita, yang sebenarnya ini menjadi tidak adil ketika start awal perempuan jauh dibandingkan dengan laki-laki.

Kebanyakan parpol telah menerapkan kuota 30% kepada perempuan untuk menjadi caleg pada pemilu 2004. Namun demikian perekrutan parpol terhadap perempuan lebih dipahami sebagai pemenuhan kewajiban saja

daripada parpol mendorong lahirnya caleg perempuan yang handal, sehingga pola *patronage* menjadi lebih mengedepan daripada sistem merit. Akan tetapi banyak parpol menempatkan kuota sekedar kosmetika politik agar supaya dianggap peka gender dan tidak melukai perjuangan aktivis perempuan. Kosmetika politik tampak dalam penempatan caleg perempuan lebih banyak pada nomor bawah daripada nomor kepala, sehingga ketika para caleg tidak memenuhi angka BPP, maka mekanisme yang dijalankan partai adalah ditarik keatas. Artinya nomor urut paling atas yang mendapatkan kursi legislatif, yang jelas-jelas kaum pria peluangnya lebih besar, sebab sebagian besar caleg pria menempati nomor urut atas. BPP menjadi jebakan bagi perempuan untuk terpilih menjadi anggota legislatif sebab baru kali ini anjuran kuota perempuan di segenap partai dan belum tersosialisasi kepada konstituen.

Ketidaksungguhan parpol dalam pemenuhan kuota terlihat dari sosialisasi partai dalam hal kuota perempuan masih sangat minim sekali kepada partai tentang pentingnya kuota itu sendiri. Pada sisi lain ranah privat menjadi kendala bagi perempuan untuk menjadi caleg ketika para suami tidak bersedia untuk memberikan dana kampanye bagi caleg perempuan, sementara politisi perempuan sendiri secara ekonomi tidak mandiri. Oleh sebab itu dana kampanye menjadi hambatan perempuan. Kurangnya dukungan partai terhadap finansial perempuan ketika perempuan melakukan kampanye untuk kemenangan dirinya. Secara umum perempuan memainkan peranan penting pada kampanye dan memobilisasi dukungan untuk partainya, namun dikarenakan mereka tidak

mempunyai posisi tawar dalam pengambilan keputusan maka hanya sedikit perempuan yang bersedia untuk menjadi caleg. Seleksi dan proses nominasi dalam parpol dibuat bias terhadap perempuan karena karakter pria lebih ditekankan dan sering menjadi kriteria dan memilih caleg. Atmosfir dan prasarana secara politik diberikan kepada perempuan dari integrasi dirinya dalam kerja partai.

Fenomena ketidaksungguhan juga terlihat dengan besarnya dana kampanye yang disetorkan kepada partai mempengaruhi penentuan nomor urut calon anggota legislatif. Nomor nomor jadi diduduki oleh para pengurus partai, tokoh tokoh masyarakat dan yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan partai baik berupa sumbangan uang maupun pengorbanan lainnya.

Sementara terbatasnya kontak dan kerjasama antara politisi perempuan dan organisasi perempuan menjadikan terbatasnya jumlah perempuan dalam proses nominasi dan seleksi. Jaringan perempuan relatif hanya didengungkan di tingkat nasional, namun di tingkat regional dan local nampak sekali tidak terlihat. Jaringan ini sangat rendah dalam memfasilitasi perempuan untuk nominasi di tingkat partai politik. Ada distansi yang jauh dan tidak adanya pertautan antara partai dengan organisasi perempuan. Pertautan antara partai dengan organisasi lebih dikarenakan ikatan ideologis daripada kepentingan gender. Kurang sinerginya elemen kekuatan politik perempuan menghasilkan keterbatasan perempuan sebagai anggota parlemen dalam pemilu. Saluran komunikasi dan lobi kurang dibuka antara jaringan perempuan dengan partai politik.

Berpijak pada kosmetika politik di

partai politik dalam pemenuhan kuota perempuan seharusnya pemerintah memfasilitasi organisasi kelompok perempuan untuk ikut memainkan peran dalam peningkatan representasi perempuan. Untuk mencapai keseimbangan gender dalam kehidupan politik sebenarnya perlu untuk memberikan jaminan komitmen pada keadilan yang direfleksikan dalam upaya pemaksa kepada parpol akan komitmennya terhadap penerapan kuota 30% bagi parpol.

Ketidakefektifan pelaksanaan kuota 30% tidak terlepas dari kelemahan struktural. Meskipun pemerintah mendeklarasikan komitmennya terhadap demokrasi tetapi ini tidak realistis untuk memberikan jaminan hak perempuan di ruang publik. Seharusnya pemerintah memfasilitasi organisasi kelompok perempuan untuk ikut memainkan peran dalam peningkatan representasi perempuan. Untuk mencapai keseimbangan gender dalam kehidupan politik sebenarnya perlu untuk memberikan jaminan komitmen pada keadilan yang direfleksikan dalam upaya pemaksa kepada parpol akan komitmennya terhadap penerapan kuota 30% bagi parpol. Oleh sebab itu perlu direvisi UU Npo.12 tahun 2003 dengan lebih menegaskan pola kuota perempuan di seluruh partai politik buka

sekedar dalam pencalegan, tetapi dalam kaderisasi, kepengurusan. Gender platform sesmestinya menjadi keharusan bagi partai politik, supaya partai tidak menjadi androsentris.

Di samping itu perlu dipertimbangkan jurus kuota yang memungkinkan lebih efektif dalam peningkatan representatif perempuan. Ketentuan BPP bagi peserta pemilu menjadi tidak adil bagi para caleg sebab perolehan suara suara terbanyak dibandingkan caleg lain belum tentu memberikan jaminan menjadi anggota legislatif. Dengan pengabaian nomor urut tetapi pertimbangan suara terbanyak yang diperoleh caleg tentunya akan mengurangi tingkat konflik internal partai dalam menetapkan caleg.

Kesalahkaprahan antara peran sosial dan biologis perempuan yang berkembang di dalam masyarakat perlu direduksi untuk mengurangi disparitas peran jenis kelamin dalam arena politik. Perempuan tidak diberi pilihan antara domain publik atau domain privat sebagaimana kaum pria. Bagi perempuan ikut dalam pemilihan parlemen tentunya perlu menyeleksi dirinya sendiri untuk ikut pada pemilu, perlu untuk menyatakan ikut sebagai caleg dari partai, perlu untuk menyatakan diri sebagai pemilih.

Daftar Pustaka

- Coole, Diana H., *Women in Political Theory: From Ancient Mysogyny to Contemporary Feminism* (Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1993).
- Diamond, Larry dan Gunther Richard, *Political Parties and Democracy* (London: The Johns Hopkins Univeristy Press, 2000).
- Fakih, M., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Illich, Ivan, *Matinya Gender* (Terjemahan) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Macdonald, Mandy (dkk), *Gender dan Perubahan Organisasi: Menjembatani Kesenjangan Antara Kebijakan dan Praktek* (INSIST dan REMDEC, 1999).
- Megawangi Ratna, *Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (Bandung: Mizan, 1999).
- Murniati, A.Nunuk P., *Getar Gender* (Buku Pertama) (Magelang: Indonesiatara, 2004).
- Rush, Michael dan Althof, Phillip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Radjawali, 1985).
- Sturgeon, Noël, *Ecofeminist Natures : Race, Gender, Feminist Theory and Political Action* (London dan New York: Routledge, 1997).
- Walter, Victoria, dan Bowe, Albha, *Practising Gender: The Tool Book* (Germany: Friedrich Ebert Stiftung, 2003).
- Makalah/Jurnal/Peraturan
- Dahlerup, Ms Drude, 2002, "No Democracy Without Women", <http://www.dahle@feminists.com>
- McElroy, Wendy, 2001, "Boss Tweed Feminism", <http://www.mac@feminists.com>
- UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

Pernyataan Maithere bahwa teknologi tidak selalu menghadirkan kebaikan mengimplikasikan betapa pentingnya peran penelitian ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam pengembangan teknologi di Indonesia di masa depan. Saya bahkan seringkali menyuruhnya sebagai sebuah imperatif mengingat bahwa tanpa kontribusi dan penelitian ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam pengembangan

teknologi seperti yang terjadi selama ini, maka "kekhawatiran Faustian bahwa pemberian kepercayaan yang terlalu besar kepada perkembangan teknologi sama maknanya dengan membuat perjanjian dengan setan" (Dixon, 1979: 15) akan dapat benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Ada beberapa alasan sangat mendasar mengapa penelitian ilmu-ilmu sosial dan humaniora tentang perkembangan teknologi di Indonesia di

Dualis sebagai bahan diskusi pada Seminar Minggu Pakar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 27 Oktober 2004.